

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Perilaku Dalam Administrasi Negara

Menurut Ali (2011:100) Setelah administrasi menjadi ilmu yang mandiri dengan struktur formal atau deskriptif ataupun fungsional serta dipengaruhi oleh pemikiran rasional munculah teori perilaku (*behavior theory*) dalam administrasi yaitu teori yang melihat kelemahan-kelemahan teori *structural* yang mengabaikan dimensi-dimensi dan prinsip-prinsip nonhierarkis teori perilaku dalam administrasi ini melakukan pengkajian terhadap dimensi-dimensi kemanusiaan, dimensi kebutuhan, dan hasrat manusia dalam administrasi.

Teori ini mendapat pengaruh dari pemikiran sosiologi, psikologi sosial dan antropologi. Pengaruh sosiologi karena manusia administrasi adalah manusia yang berada dalam kelompok kerja sama yang sesungguhnya menjadi aspek yang diperhatikan sosiologi. Aspek psikologi sosial, karena manusia administrasi tidak saja sebagai *human being* yang memiliki cita, karsa, dan rasa tetapi juga sebagai anggota masyarakat yang dalam berperilaku keprilakuan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana ia berada. Aspek antropologi, manusia administrasi adalah seorang individu yang harus dihargai martabatnya selaku manusia yang memiliki ranah dalam kesatuan yang tak terpisahkan, meliputi ranah jasmani yang harus dipahami melalui cipta, karsa dan rasa serta ranah spiritual yang harus diisi

oleh nilai-nilai moralitas yang mendasar atau yang paling mendasar adalah nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dalam teori aspek ini perilaku dan nilai mendapat tempat dalam pemahaman tentang administrasi sekaligus dalam aplikasinya. Aspek perilaku administrasi, organisasi formal dan motivasi pribadi menjadi fokus utama.

Perilaku individu dalam administrasi terjadi karena tuntutan pemenuhan hasratnya sebagai manusia sehingga mendorong ia untuk berinteraksi antara sesamanya atau dengan lingkungannya walaupun keterikatannya dalam struktur formal yang melahirkan bentuk-bentuk kerja sama yang informal dalam berbagai hal apalagi dalam kerja sama yang formal yang diikat oleh hierarki seperti perilaku dalam pemulihan alternatif dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Notoatmodjo (2010:26) Perilaku adalah totalitas yang terjadi pada orang yang bersangkutan. dengan kata lain, perilaku adalah merupakan keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktifitas seseorang yang merupakan hasil bersama antara faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku seseorang adalah sangat kompleks, dan mempunyai bentangan yang sangat luas. Benyamin Bloom (1908) seorang ahli psikologi pendidikan membedakan adanya 3 area, wilayah, ranah atau domain perilaku ini yakni kognitif (*cognitive*), afektif (*affective*), dan psikomotor (*psychomotor*). Kemudian oleh ahli pendidikan di Indonesia, ketiga domain ini diterjemahkan dalam cipta (kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotor), atau pericipta, perirasa, dan peritindak. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan pembagian domain oleh Bloom ini, dan untuk kepentingan pendidikan praktis, dikembangkan menjadi tiga ranah perilaku yaitu:

### 1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah hasil dari pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkatan pengetahuan yaitu: tahu (*know*), memahami (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), evaluasi (*evaluation*).

### 2. Sikap (*attitude*)

Sikap adalah juga respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan. Seperti halnya pengetahuan, sikap juga mempunyai tingkat-tingkat berdasarkan intensitasnya yaitu: Menerima (*receiving*), Menanggapi (*responding*), Menghargai (*valuing*), Bertanggung jawab (*responsible*).

### 3. Tindakan atau praktik (*practice*)

Seperti telah disebutkan diatas bahwa sikap adalah kecenderungan untuk bertindak (praktik). Praktik atau tindakan ini dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan menurut kualitasnya yaitu: praktik terpimpin (*guided response*), praktik mekanisme (*mechanisme*), adopsi (*adoption*).

Menurut Anggara (2012:102) Teori perilaku, atau *the behavior theory of organization* berpendapat bahwa ada tidaknya, baik buruknya organisasi tergantung pada sikap kelakuan (*behavior, gedraging*) para anggotanya. Salah seorang penganut teori ini yang terkenal adalah Herbert A. Simon dalam bukunya “*administrative behavior* “ masalah organisasi menurut penganut teori ini adalah

bagaimana membuat warga organisasi itu bersikap, berfikir dan bertingkah laku sebagai “manusia organisasi” (*organization man*) yang tepat.

Menurut Pasolong (2011:123) Teori perilaku (*behavior theory*) dilandasi pemikiran, bahwa kepemimpinan merupakan interaksi antara pemimpin dengan pengikut, dan dalam interaksi pengikutlah yang menganalisis dan mempersepsi apakah menerima atau menolak pengaruh dari pimpinannya. Pendekatan perilaku menghasilkan dua orientasi perilaku pemimpin yaitu: (1) pemimpin yang berorientasi pada tugas (*task orientation*) atau yang mengutamakan penyelesaian tugas dan (2) perilaku pemimpin yang berorientasi pada orang (*people orientation*) atau yang mengutamakan hubungan kemanusiaan.

Pemimpin yang berorientasi pada tugas menampilkan gaya kepemimpinan otokratik, sedangkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan kemampuan menampilkan gaya demokratis. Gaya kepemimpinan demokratik mendorong bawahan untuk menentukan kebijakan sendiri, member pandangan tentang langkah dan hasil yang diperoleh, memberi kebebasan untuk memulai tugas, mengembangkan inisiatif, memelihara komunikasi dan interaksi yang luas, menerapkan hubungan suportif. Sedangkan gaya kepemimpinan otokratik mempunyai ciri antara lain: menentukan kebijakan untuk anggota, member bawahan, member tugas secara instruksi, menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan bawahan, mengendalikan secara ketat pelaksanaan tugas, interaksi dengan anggota terbatas, tidak mengembangkan inisiatif bawahan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa teori perilaku Administrasi Negara merupakan keseluruhan pemahaman dan aktifitas ada

tidaknya, baik buruknya organisasi tergantung pada sikap kelakuan (*behavior, gedraging*) para anggotanya yang didasarkan pada tiga ranah perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan. Hubungannya dengan penelitian ini adalah karena teori perilaku mencakup keseluruhan (totalitas) pemahaman dan aktifitas seseorang yang merupakan hasil bersama antara faktor internal dan faktor eksternal yang didalamnya mencakup tiga ranah perilaku yaitu pengetahuan, sikap dan tindakan. Khususnya pada pengetahuan karena pengetahuan sangat menunjang pemahaman seseorang atau pegawai negeri sipil yang terdapat pada satuan kerja tingkat Dinas/Badan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

## **B. Tinjauan Tentang Pendidikan**

*Dictionary Of Education* dalam Ihsan (2011:4) menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya didalam masyarakat di mana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional, Pasal 1 menjelaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Notoatmojo (2009:2) Pendidikan adalah suatu upaya untuk mengembangkan potensi manusia sehingga mempunyai kemampuan untuk mengelola sumberdaya alam yang tersedia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan di dalam GBHN tahun 1973 disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat serta mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah. di Indonesia pendidikan dibedakan menjadi dua yaitu:

menurut Ihsan (2011:21) jenis pendidikan nasional terdiri dari pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah:

#### 1. Pendidikan Sekolah

Jenis pendidikan sekolah adalah jenis pendidikan yang berjenjang, berstruktur dan berkesinambungan, sampai dengan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan sekolah mencakup pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan dan pendidikan angkatan bersenjata republik Indonesia. Pendidikan umum mempersiapkan peserta didik menguasai kemampuan dasar untuk melakukan pendidikan atau memasuki lapangan kerja. Pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik menguasai keterampilan tertentu untuk memasuki lapangan kerja dan sekaligus mempersiapkan bekal untuk melakukan pendidikan kejuruan yang lebih tinggi. Pendidikan kedinasan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menjalankan tugasnya. pendidikan

keagamaan mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan tugas keagamaan. pendidikan angkatan bersenjata republik Indonesia mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menjalankan tugasnya.

## 2. Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang tidak selalu terikat oleh jenjang dan struktur persekolahan, tetapi dapat berkesimambungan. pendidikan yang memungkinkan terjadi perkembangan peserta didik dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, keterampilan dan keahlian dengan pendidikan ini setiap warga negara dapat memperluas wawasan pemikiran dan peningkatan kualitas pribadinya dengan menerapkan landasan belajar seumur hidup. Pendidikan luar sekolah dapat dibedakan menjadi pendidikan keterampilan, pendidikan perluasan wawasan memungkinkan peserta didik memiliki pemikiran yang lebih luas. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan, nilai moral, norma sosial dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat krumitan bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

### 1. Pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam program masa belajar selama 6 tahun.

### 2. Pendidikan menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. pendidikan menengah diselenggarakan dengan masa program belajar 3 tahun, sekolah menengah umum terdiri dari sekolah menengah tingkat pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA)

### 3. Pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan professional sehingga dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan manusia (Kepmendikbud No.0186/P/1884) Mempunyai tujuan dalam rangka menampung calon mahasiswa yang minat dan kemampuannya berbeda-beda karena setiap universitas/perguruan tinggi

akademik, membuka program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dimasyarakat dengan lama studi yang berbeda-beda.

### **C. Tinjauan Tentang Pengalaman Kerja**

Menurut Manulang (1994:15) pengalaman kerja adalah proses pembentukan pengetahuan dan keterampilan tentang metode suatu pekerjaan karena keterlibatan karyawan tersebut dalam pelaksanaan tugas pekerjaan, Menurut Asri (1986:7) pengalaman kerja adalah ukuran tentang lama waktu masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik. dan menurut Handoko (1984:82) pengalaman kerja adalah pengetahuan dan keterampilan yang telah diketahui dan dikuasai seseorang yang akibat dari perbuatan atau pekerjaan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki. Pengalaman kerja yang berkontribusi professional bukan berapa lama bekerja yang sebenarnya yang dibutuhkan melainkan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam berkontribusi pada pekerjaan, dapat dilihat dari gairah, tujuan, nilai, kebiasaan, kemampuan dan usaha dan prestasi yang diperoleh.

menurut Foster Bill (2001:43) indikator pengalaman kerja sebagai berikut:

1. Lama waktu masa kerja

Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik.

2. Tingkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki

Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau formasi lain yang dibutuhkan oleh pegawai. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.

Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan.

## **D. Konsep Pemahaman**

### **1. Pengertian Pemahaman**

Menurut Daryanto (2007:106) Pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga yaitu menerjemahkan bukan saja pengalihan (*translation*) tetapi juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model, menginterpretasi merupakan kemampuan yang lebih luas dari menerjemahkan dan *mengekstrapoisasi* berbeda dari menerjemahkan dan menafsirkan tetapi lebih tinggi sifatnya.

Menurut Sadiman (1946:109) Pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Kemudian Menurut Partowisastro (1983:22-24) mengemukakan empat macam pengertian pemahaman, yakni sebagai berikut: (1) pemahaman berarti melihat hubungan yang belum nyata pada pandangan pertama; (2) pemahaman berarti mampu menerangkan atau dapat melukiskan tentang aspek-aspek, tingkatan, sudut pandangan-pandangan yang berbeda; (3) pemahaman berarti memperkembangkan kesadaran akan faktor-faktor yang penting; dan (4) berkemampuan membuat ramalan yang beralasan mengenai tingkah lakunya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu. Kemampuan memahami ini menjadi bagian penting dalam mengetahui atau mempelajari sesuatu. Belajar dengan mengharapkan sesuatu hasil yang baik, tidak cukup hanya sebatas kemampuan mengetahui. Seseorang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman, sudah tentu ia mengetahuinya. Jadi, pemahaman masih lebih tinggi tingkatannya dari pada pengetahuan.

## 2. Indikator Pemahaman

Menurut Sukirman (2012:57) indikator pemahaman adalah menjelaskan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menarik interensi, mendiskusikan, menerangkan, mengemukakan, merangkum dan menjabarkan. Sedangkan menurut Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2010:23) indikator pemahaman kemampuan menangkap pengertian, menerjemahkan dan menafsirkan.

Menurut Suharsimi (2008:137) indikator pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dari tiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator pemahaman mencakup beberapa unsur seperti mengerti, mengetahui, menerjemahkan, memberikan contoh, menerangkan dll lebih jelasnya pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari.

## 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman

Pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami dan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar objek yang diketahui oleh sebab itu, pengetahuan yang banyak merupakan unsur penting dalam pemahaman seseorang. Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya pemahaman seseorang. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentukan yang terus menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan:

1. Faktor *internal* menurut Notoatmodjo (2003:13):

a. Pendidikan

Tokoh pendidikan abad 20 M. J. Largevelt yang dikutip oleh Notoatmojo 2003 mendefinisikan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kedewasaan. Sedangkan GBHN Indonesia mendefinisikan lain bahwa Pendidikan sebagai suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

b. Minat

Minat diartikan sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu dengan adanya pengetahuan yang tinggi didukung minat yang cukup dari seseorang sangatlah mungkin seseorang tersebut akan berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan.

c. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang (Middie Brook, 1994) yang dikutip oleh Azwar (2009), mengatakan bahwa tidak adanya suatu pengalaman sama sekali, suatu objek psikologis cenderung akan bersikap negatif terhadap objek tersebut untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan

yang kuat. Karena itu sikap yang lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih mendalam dan lama membekas.

d. Usia

Usia individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa akan lebih dipercayakan dari pada orang yang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman dan kematangan jiwanya, makin tua seseorang akan makin kondusif dalam menggunakan koping terhadap masalah yang dihadapi (azwar, 2009).

Faktor *internal* menurut Notoatmodjo (2003:13), antara lain:

a. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan primer ataupun sekunder, keluarga dengan status ekonomi baik lebih mudah tercukupi dibanding dengan keluarga status ekonomi rendah. Hal ini akan mempengaruhi kebutuhan akan informasi termasuk kebutuhan sekunder. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang tentang berbagai hal.

b. Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal, Memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif dibawa oleh informasi tersebut apabila arah sikap tertentu. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk menggunakan kesadaran masyarakat terhadap suatu inovasi yang berpengaruh perubahan perilaku, biasanya digun akan melalui media massa.

c. Kebudayaan atau lingkungan

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan kita. Apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin berpengaruh dalam pembentukan sikap pribadi atau sikap seseorang.

Faktor- faktor yang mempengaruhi pengetahuan menurut (Mubarak, 2007:30):

a. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang perlu diperkenalkan.

b. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik seseorang secara garis besar ada empat kategori perubahan yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

d. Minat

Minat sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh suatu pengetahuan yang mendalam.

e. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang kurang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif.

d. Kebudayaan lingkungan sekitar

Apabila dalam wilayah mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin lingkungan sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

e. Informasi

Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

Menurut BAPPENAS (2002) Pemahaman individu diukur dengan cara memberi pertanyaan pertanyaan tertutup mengenai suatu kasus umum dalam pelaksanaan tata pemerintahan dikaitkan dengan 14 (empat belas) prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagaimana tersebut di atas. Pilihan jawaban yang tersedia dirumuskan dari berbagai kemungkinan keputusan berdasarkan suatu pola pikir tertentu yang salah satunya diturunkan dari konsep tata pemerintahan yang baik.

Menurut BAPPENAS (2002) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman aparatur terhadap prinsip *good governance*, yaitu:

a. Usia

usia aparatur pemerintah daerah yang terhitung dari mulai  $\leq 25$ , 26-30, 30-35, 35-40,  $< 40$ .

b. Jenis kelamin

aparatur pemerintah daerah yang meliputi jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

c. Jenis unit kerja

Jenis unit kerja yang terdiri dari kepala kantor, sekretaris, kasi maupun staf pada lembaga terkait.

d. Tingkat pemerintahan

Tingkat pemerintahan meliputi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

e. Masa kerja

Masa kerja meliputi lamanya kerja pegawai yang ditunjukkan dalam satuan tahun meliputi <8 th ,8-16 th , > 16 th.

f. Pendidikan

Jenjang pendidikan formal tertinggi pegawai aparatur pemerintah meliputi SMU, Diploma S-1, S-2 ,S-3 sangat mempengaruhi wawasan setiap aparatur.

g. Jabatan

Jabatan aparatur pemerintah meliputi, Staff , Eselon IV, Eselon III, Eselon II, Eselon I.

Dari beberapa pendapat di atas faktor mempengaruhi tingkat pemahaman yang dipakai oleh peneliti yaitu faktor pendidikan dan pengalaman, karena pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Faktor pengalaman merupakan suatu peristiwa yang dialami seseorang, dalam penelitian ini faktor pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman kerja, semakin banyak pengalaman kerja aparatur maka tingkat pemahaman akan semakin bertambah. Pada penelitian ini

difokuskan pada pengukuran tingkat pemahaman aparatur pemerintah pada prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu dari prinsip *good governance*.

### **E. Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:23) akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban periodik. Artinya apabila terjadi penyalahgunaan maupun penyelewengan terhadap pelaksanaan kebijakan maka unit atau organisasi yang bersangkutan harus dapat bertanggung jawab penuh atas tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki melalui media pertanggung jawaban yang telah ditentukan.

Menurut UNDP dalam Syamsudin Haris (2007:59) akuntabilitas merupakan setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tanggung gugat dan tanggung jawab tidak hanya diberikan kepada atasan saja melainkan juga pada pemegang saham (*stakeholder*), yakni masyarakat luas.

Menurut Adisasmita (2011:89) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Berdasarkan ketiga diatas, dapat disimpulkan akuntabilitas merupakan suatu tindakan aparatur pemerintah sebagai pihak untuk memberi pertanggung jawaban

atas segala kegiatan yang pernah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Sesuai dengan tugas pokok masing masing aparaturn pemerintah.

### **1. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas**

Menurut Adisasmita (2011:90), Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu;

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seeluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## 2. Indikator Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma *eksternal* yang dimiliki oleh para *stakeholder* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Menurut Krina P (2003:10) berdasarkan tahapan sebuah program, akuntabilitas dari setiap tahapan adalah:

1. Pada tahap proses pembuatan suatu keputusan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:
  - a. Pembuatan sebuah keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
  - b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi *standar* etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di *stakeholder*.
  - c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sesuai dengan visi dan misi organisasi serta standar yang berlaku.
  - d. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa *standar* telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggung jawaban jika *standar* tersebut tidak terpenuhi.
  - e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
2. Pada tahap sosialisasi kebijakan, beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas publik adalah:

- a. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal.
- b. Akurasi dan kelengkapann informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah.

Adapun alat ukur dari indikator tahapan prinsip akuntabilitas Menurut Krina P (2003) yaitu:

- a. Visi & misi atau *Job description* (acuan pelayanan) seperti: pilihan metode pelayanan, informasi tentang tingkat pelayanan, mekanisme/standar pelayanan, standar efisiensi, kapasitas yg memadai, kualitas yang memadai.
- b. produk-produk kebijakan daerah (proses pembuatan keputusan) seperti: Pola dasar, Propeda, Renstra, Repetada, APBD, Sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian pembangunan daerah, SK, Anggaran tahunan, Perda.
- c. *Annual report* (Laporan pertanggung jawaban)
- d. Laporan keuangan (sistem pengelolaan keuangan)
- e. Kebijakan daerah dalam Pengadaan barang dan jasa, Pajak dan retribusi, Demokratisasi, Keuangan daerah, Penanganan pengaduan, kotak pos pengaduan, berita-berita di media massa, pengaduan melalui ornop (LSM), hasil studi & penelitian, monitoring independen.

### 3. Faktor-faktor keberhasilan akuntabilitas

Menurut Adisasmita (2011:87), Untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas perlu diperhatikan faktor-faktor berikut ini:

a. Kepemimpinan yang berkemampuan.

Untuk menyelenggarakan akuntabilitas yang baik di instansi pemerintah diperlukan pemimpin yang sensitif, responsif, dan akuntabel serta transparan kepada bawahannya maupun kepada masyarakat.

b. Debat publik.

Sebelum kebijakan pokok, besar atau penting disahkan seharusnya dilakukan debat publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan yang maksimal. Dengan demikian akan diketahui apa dan bagaimana indikator kinerja yang harus dicapai organisasi, masyarakat akan memberikan banyak masukan.

c. Koordinasi

Koordinasi yang baik didalam organisasi atau instansi maupun antar instansi pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas. Koordinasi memang mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan, karena adanya konflik kepentingan diantara pihak-pihak yang berkoordinasi.

d. Otonomi

Instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang dianggap paling efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan organisasi. Otonomi yang dimaksud adalah pada teknis pelaksanaan kebijakan, tetapi harus tetap terpadu dengan kebijakan nasional. Otonomi

juga jangan sampai mengurangi koordinasi dan keberhasilan tujuan nasional.

e. Dapat diterima oleh semua pihak

Tujuan dan makna dari akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.

f. Negosiasi

Harus dilakukannya negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. Penentuan siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan dan siapa yang terkait dengan kegiatan tersebut perlu ditetapkan.

g. Perlu pemahaman masyarakat

Perlu dibuatkan pilot *project* pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. Penerimaan masyarakat akan sesuatu hal yang baru akan banyak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hal baru tersebut.

h. Adaptasi secara terus menerus

Perubahan yang terjadi dimasyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus-menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi dimasyarakat.

#### 4. Jenis-jenis akuntabilitas

Menurut Yango dalam Adisasmita (2011:79-80) jenis-jenis akuntabilitas yaitu:

a. Traditional atau *regularity accountability*

Akuntabilitas tradisional atau reguler memfokuskan diri pada transaksi-transaksi reguler atau transaksi fiskal untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada aturan yang berlaku terutama yang terkait dengan peraturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima.

b. *Managerial accountability*

Akuntabilitas managerial menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Pada saat yang bersangkutan akuntabilitas ini menitik beratkan pada peranan manajer atau pengawas dan mengharapkan agar pejabat dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yang telah ada, tetapi juga untuk menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik. Efisiensi pengelolaan sumberdaya yang menjadi kewenangan suatu instansi pemerintah merupakan ciri utama akuntabilitas manajerial.

c. Program *accountability*

Akuntabilitas program memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan disekitar pencapaian tujuan pemerintah, bukan hanya sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak-pihak dimana instansi akan dinilai sesuai lingkup tugasnya (bukan pelayanan pada semua pihak). Pencapaian tujuan tersebut tentunya dikaitkan dengan program-program instansi pemerintah tersebut yang dikaitkan dengan program nasional, sehingga keberhasilan instansi pemerintah tersebut mempunyai sumbangan (kontribusi) yang jelas pada capaian program nasional.

d. *Process accountability*

Akuntabilitas proses memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas organisasi. Untuk itu perlu dipertimbangkan masalah etika dan moral setiap kebijakan pemerintah setiap pelaksanaannya. Hal inilah yang sering dilanggar oleh pemerintah yang bersifat otokratik, dimana rakyat tidak memiliki kuasa untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang nyata-nyata merugikan rakyat, baik dari segi moral, bahkan kadang kala jiwa.

Menurut Tjokroamidjojo (2001:45) Jenis-jenis akuntabilitas adalah :

- a. akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
- b. akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan BPK

- c. akuntabilitas hukum, dalam bentuk aturan hukum, reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum
- d. akuntabilitas ekonomi (efisiensi), dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis, tanggung gugat rakyat melalui sistem perwakilan

Menurut Mahmudi dalam Ali (2012:224) akuntabilitas publik dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh akuntabilitas kepala dinas kepada Bupati atau Walikota, akuntabilitas menteri kepada presiden, akuntabilitas kepala unit kepada kepala cabang, akuntabilitas kepala cabang kepada CEO dan sebagainya.
- b. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yang merupakan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat secara luas atau terhadap sesama lembaga yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

Lembaga administrasi negara dalam Hakim (2012:179) membedakan akuntabilitas kedalam tujuh macam yaitu:

- a. *Traditional atau regularity accountability* memfokuskan pada transaksi-transaksi reguler atau transaksi-transaksi fiskal untuk mendapat informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku yang terkait dengan peraturan fiskal dan peraturan pelaksanaan administrasi. Akuntabilitas ini sering pula disebut "*compliance accountability*"

- b. *Managerial accountability* menitik beratkan pada efisiensi dan kehebatan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya.
- c. *Program accountability* memfokuskan pada pencapaian hasil operasi pemerintah.
- d. *Proses accountability* memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi.
- e. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundang-undangan.
- f. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil-hasil kegiatan pemerintah.
- g. Akuntabilitas prosedural, yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

## **F. Aparatur Pemerintah Daerah**

Menurut Josef (2010:280) Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah dimilikinya aparatur pemerintah tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya. Sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah

menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya.

Untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah, maka suatu langkah sistematis perlu diambil. Upaya-upaya peningkatan frekuensi syarat pendidikan dan pengalaman berorganisasi, ataupun peningkatan frekuensi latihan, kursus, dan sebagainya, yang berkaitan dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing, perlu lebih ditingkatkan.

Menurut Josef (2010:88) Suatu daerah disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
2. Urusan rumah tangga daerah itu diatur dan diurus atau diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijakan daerah itu sendiri.
3. Untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Dari keempat atribut diatas, kemampuan aparatur pemerintah daerah merupakan satu faktor yang menentukan apakah suatu daerah dapat atau mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan baik atau tidak. Bagaimana juga berhasil atau tidaknya suatu kegiatan dilaksanakan dalam hal ini pelaksanaan otonomi daerah akan sangat tergantung pada manusia sebagai pelaksana atau aparatur pemerintah itu sendiri.

### **G. Kerangka Pikir**

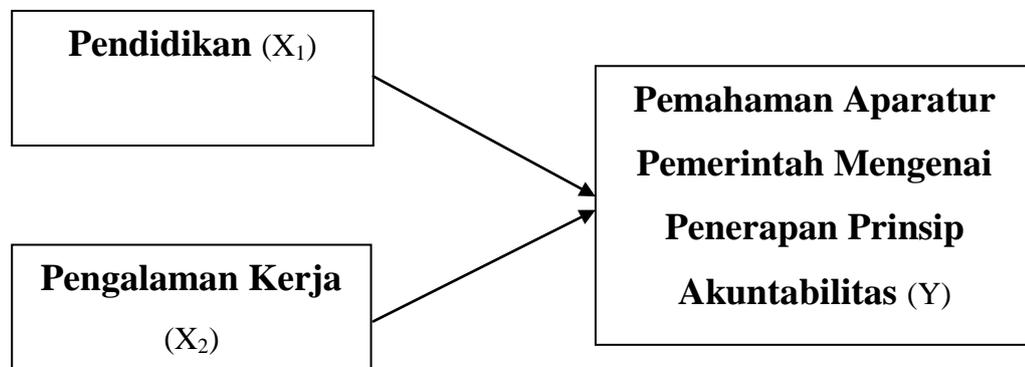
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa pemerintah daerah adalah unsur institusi lembaga negara yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif menjalankan sistem pemerintahan secara bersama-sama berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* merupakan cita-cita yang menjadi visi setiap penyelenggaraan negara diberbagai belahan bumi, termasuk indonesia. Secara sederhana *good governance* dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik oleh sebab itu dalam penelitian ini ditekan kan pada prinsip akuntabilitas (pertanggung jawaban). Namun dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab diperlukan adanya pemahaman aparatur pemerintah, faktor yang mempengaruhi pemahaman Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu pendidikan dan pengalaman kerja.

Menurut Notoatmojo (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yang merupakan unsur terpenting dalam pemahaman seseorang yaitu faktor internal: pendidikan, minat, pengalaman, usia dan faktor internal: ekonomi, informasi, kebudayaan/ lingkungan. Dalam penelitian ini dipilih dua variabel independen yaitu pendidikan ( $X_1$ ) dan pengalaman kerja ( $X_2$ ). Faktor pendidikan dijadikan variabel ( $X_1$ ) karena merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dalam penelitian ini pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal aparatur. Sedangkan Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.

Faktor pengalaman kerja dijadikan variabel ( $X_2$ ) karena pengalaman mempengaruhi suatu peristiwa yang dialami seseorang. Dalam penelitian ini faktor pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman kerja yang merupakan sebagai salah satu ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. semakin banyak pengalaman kerja aparatur maka pemahaman akan semakin bertambah.

Variabel dependen (Y) yaitu pemahaman aparatur terhadap penerapan prinsip akuntabilitas yang merupakan tingkat kemampuan diri aparatur dalam mengerti dan mengetahui kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban yang menjadi suatu ukuran yang

menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki oleh para stakeholder yang berkepentingan dengan layanan tersebut dan merupakan salah satu prinsip Untuk menuju *good governance* dengan indikator yaitu Mengerti, Mengetahui, Menerjemahkan, Memberikan contoh prinsip-prinsip akuntabilitas. Secara sistematis kerangka pemikiran hubungan antara tingkat pemahaman aparatur pemerintah terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dapat dilihat pada gambar 1.



## H. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:63-64) perumusan hipotesis merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono (2007:77) Hipotesis

assosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah assosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan anantara dua variabel atau lebih.

1. Ha : Pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman aparaturn pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas.  
Ho : Pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman aparaturn pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas.
2. Ha : Pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman aparaturn pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas.  
Ho : Pengalaman kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman aparaturn pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas.
3. Ha : Pendidikan dan pengalaman kerja secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman aparaturn pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas.  
Ho : Pendidikan dan pengalaman kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman aparaturn pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas.